BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016

DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografis

a) Letak Geografis

Apabila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110˚ 40” – 110˚ 70” Bujur Timur dan 70˚ 28” – 7˚ 46” Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22˚ – 31˚ .

Rata–rata ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar berada di atas permukaan laut yakni sebesar 511 m, adapun wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan Jaten yang hanya 90 m dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu yang mencapai 2.000 m di atas permukaan laut.

b) Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah utara	:	Kabupaten Sragen
Sebelah timur	:	Provinsi Jawa Timur
Sebelah selatan	:	Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
Sebelah barat	:	Kota Surakarta dan Kab. Boyolali

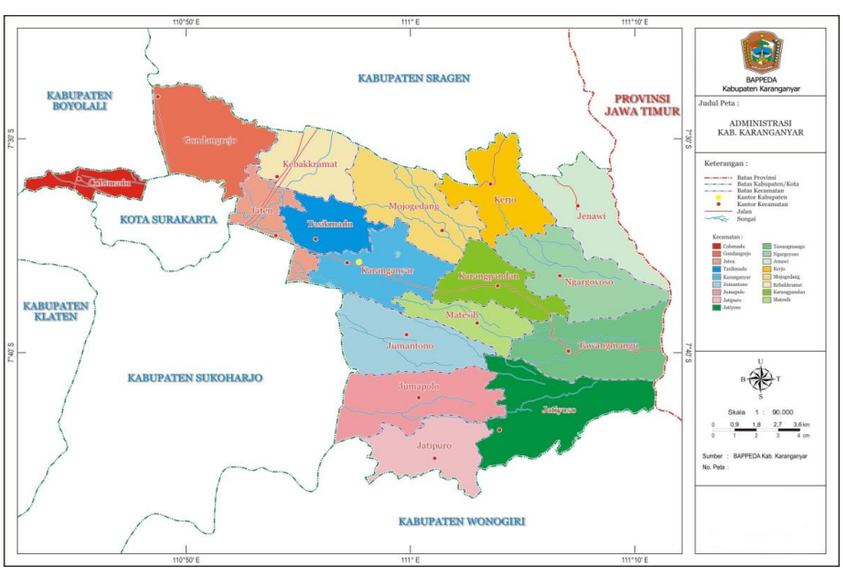

Gambar 2.1. Peta kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 177 Desa/Kelurahan yag terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa.

c) Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha.

Tabel 2.1. Luas Wilayah, Tanah Sawah dan Tanah Kering menurut Kecamatan di Kab. Karanganyar Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Tanah Sawah (Ha)	Luas Tanah Kering (Bukan Sawah) (Ha)
1	2	3	4	5
1	Jatipuro	4.036,50	1.468,24	2.568,26
2	Jatiyoso	6.716,49	1.293,75	5.422,74
3	Jumapolo	5.567,02	1.834,00	3.733,02
4	Jumantono	5.355,44	1.589,00	3.766,44
5	Matesih	2.626,63	1.287,00	1.339,63
6	Tawangmangu	7.003,16	719,24	6.283,92
7	Ngargoyoso	6.533,94	752,00	5.781,94
8	Karangpandan	3.411,08	1.552,00	1.859,08
9	Karanganyar	4.302,64	1.720,20	2.582,44
10	Tasikmadu	2.759,73	1.518,11	1.241,62
11	Jaten	2.554,81	1.212,12	1.342,69
12	Colomadu	1.564,17	509,00	1.055,17
13	Gondangrejo	5.679,95	1.085,98	4.593,97
14	Kebakkramat	3.645,63	2.174,00	1.471,63
15	Mojogedang	5.330,90	2.025,81	3.305,09
16	Kerjo	4.682,27	1.076,00	3.606,27
17	Jenawi	5.608,28	524,00	5.084,28
	Jumlah	77.378,64	22.340,45	55.038,19

Sumber : KDA, BPS Kabupaten Karanganyar,2015

2.1.2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis sangat penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), baik dari segi jumlah penduduk, sebaran penduduk, usia penduduk, maupun tingkat pendidikan karena penduduk menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.

1) **Jumlah dan Sebaran Penduduk**

Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan data di atas sebanyak 856.196 jiwa, terdiri dari laki-laki 423.518 jiwa dan perempuan 432.680 jiwa, dengan sex ratio 97,88%. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Jaten, yaitu 82.659 jiwa Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 25.770 jiwa.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Menurut Kecamatan tahun 2015

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Jatipuro	14.072	13.941	28.013
2.	Jatiyoso	17.918	17.902	35.820
3.	Jumapolo	17.699	17.408	35.107
4.	Jumantono	20.509	20.964	41.473
5.	Matesih	19.573	20.015	39.588
6.	Tawangmangu	21.859	22.183	44.042
7.	Ngargoyoso	15.856	16.222	32.078
8.	Karangpandan	19.270	19.756	39.026
9.	Karanganyar	38.846	39.984	78.830
10.	Tasikmadu	29.113	30.247	59.360
11.	Jaten	40.708	41.951	82.659
12.	Colomadu	39.092	40.293	79.385
13.	Gondangrejo	38.876	39.461	78.337
14.	Kebakkramat	30.490	31.393	61.883
15.	Mojogedang	30.312	30.746	61.058
16.	Kerjo	16.685	17.084	33.769
17.	Jenawi	12.640	13.130	25.770
	Jumlah	423.518	432.680	856.196

Sumber : KDA, BPS, 2016

2) **Penduduk menurut usia**

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Menurut Usia tahun 2015

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	0 – 4	35.162	33.363	68.525
2.	5 – 9	35.204	33.688	68.892
3.	10 – 14	33.326	31.511	64.837
4.	15 – 19	32.844	32.013	64.857
5.	20 – 24	31.061	30.814	61.875
6.	25 – 29	30.082	31.623	61.705
7.	30 – 34	30.918	32.815	63.733
8.	35 – 39	31.991	32,968	64.958
9.	40 – 44	31.630	31.838	63.468
10.	45 – 49	29.060	30.921	59.981
11.	50 – 54	28.545	29.131	57.676
12.	55 – 59	23.985	23.775	47.760
13.	60 – 64	17.876	17.812	35.688
14.	65 – 69	12.035	13.203	25.238
15.	70 – 74	8.722	10.870	19.592
16.	75+	11.077	16.335	27.413
	Jumlah	423.518	432.680	856.196

Sumber : KDA, BPS, 2016

3) **Penduduk menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu**

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Tahun 2015

No.	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Angkatan Kerja	265.360	201.144	466.504
	1. Bekerja	254.535	195.154	449.689
	2. Pengangguran Terbuka	10.825	5.990	16.815
2.	Bukan Angkatan Kerja	55.165	133.667	188.842
	1. Sekolah	30.411	28.995	59.406
	2. Mengurus Rumah Tangga	10.006	91.669	101.675
	3. Lainnya	14.748	13.013	27.761
	Jumlah	**320.525**	**133.677**	**655.346**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		82,79	60,08	71,18
Tingkat Pengangguran		4,08	2,98	3,60

Sumber : KDA, BPS, 2016

4) **Penduduk menurut Lapangan Pekerjaan**

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Selama Seminggu Tahun 2015

No	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	68.357	51.176	119.533
2.	Industri Pengolahan	48.295	61.812	110.107
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	45.695	47.337	93.032
4.	Jasa Kemasyarakatan	32.790	29.778	62.568
5.	Lainnya (pertambangan, galian, listrik, gas, air, bangunan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, persewaan)	59.398	5.051	64.449
	Jumlah	**254.535**	**195.154**	**449.689**

Sumber : KDA, BPS, 2016

2.1.3. Perangkat Daerah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, menyebabkan ada perubahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Perubahan jumlah dan tugas fungsi

Perangkat Daerah akan mempengaruhi kebutuhan belanja pegawai. Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sejak tahun 2017 menjadi Perangkat Daerah, perubahan dilakukan dengan penggabungan, perubahan nama, perubahan tugas dan fungsinya.

Aparatur Negara (PNS) Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Per 31 Desember 2015 berjumlah 11.299 orang, tersebar dalam Sekretariat, Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kecamatan, serta diperbantukan pada Sekretariat KPUD.

Tabel 2.6. Perangkat Daerah dan Urusan Yang ditangani

No	Perangkat Daerah (Unit Kerja)	Urusan Yang Ditangani
1	2	3
1	Sekretariat Daerah (SETDA)	• Administrasi Pemerintahan • Kesehatan • Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat • Sosial • Pertanahan • Pemberdayaan Masyarakat Desa • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Penanaman Modal • Kepemudaan dan Olah Raga • Pertanian • Energi dan Sumberdaya Mineral • Kepegawaian
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SETWAN)	• Administrasi Pemerintahan
3	Inspektorat	• Pengawasan
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG)	• Perencanaan • Penelitian dan Pengembangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Badan Keuangan Daerah (BKD)	• Keuangan • Perencanaan
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM)	• Kepegawaian
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP)	• Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	• Lingkungan Hidup
9	Dinas Pendidikan dan	• Pendidikan

No	Perangkat Daerah (Unit Kerja)	Urusan Yang Ditangani
1	2	3
	Kebudayaan (DISDIKBUD)	• Kebudayaan • Administrasi Pemerintahan
10	Dinas Kesehatan (DKK)	• Kesehatan
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perencanaan • Administrasi Pemerintahan
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	• Penanaman Modal • Perindustrian
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMASDES)	• Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	• Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Keluarga Berencana
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)	• Administrasi Kependudukan dan Capil
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (DISPARPOR)	• Pariwisata • Kepemudaan dan Olah Raga • Perencanaan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)	• Komunikasi dan Informatika • Perencanaan • Administrasi Pemerintahan
18	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISHUBPKP)	• Perhubungan • Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman • Pertanahan • Lingkungan hidup
19	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (DISDAGNA KERKOP UKM)	• Perdagangan • Tenaga Kerja • Lingkungan Hidup • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Transmigrasi
20	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan (DISPERTAN)	• Pertanian
24	Dinas Perikanan dan Peternakan (DISNAKKAN)	• Kelautan dan Perikanan • Pertanian
25	Dinas Sosial (DINSOS)	• Sosial
26	Dinas Arsip Dan Perpustakaan (DISARPUS)	• Perpustakaan • Kearsipan • Administrasi Pemerintahan
27	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	• Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat • Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Perangkat Daerah (Unit Kerja)	Urusan Yang Ditangani
1	2	3
		• Pengawasan
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	• Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
29	Kecamatan (17 Kec.)	• Administrasi Pemerintahan • Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat • Pemberdayaan Masyarakat Desa • Penanaman Modal • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kepemudaan dan Olah Raga • Kebudayaan • Pertanahan • Sosial • Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil • Pendidikan

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Karanganyar, Tahun 2017

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahuh 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi, yaitu pada dari tahun 2011 sampai tahun 2012mengalami kenaikan dari 4,95% menjadi 5,90%, namun pada tahun 2012 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan menjadisebesar 5,05%. Secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2.2.

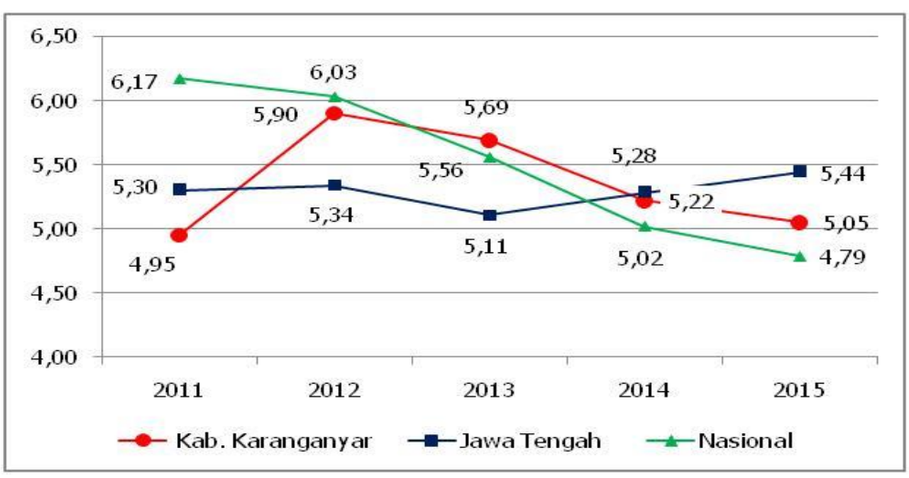

Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten-Kota di Indonesia 2011-2015, 2016

Gambar 2.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar relevan dengan Nasional yang terus menurun, berbeda dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan pada periode tahun yang sama.

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar sebesar 5,05% berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah (5,44%) dan di atas capaian Nasional (4,79%).Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten sekitar di Jawa Tengah pada tahun 2015, Kabupaten Karanganyar merupakan terendah pertama, seperti terlihat pada gambar 2.3.

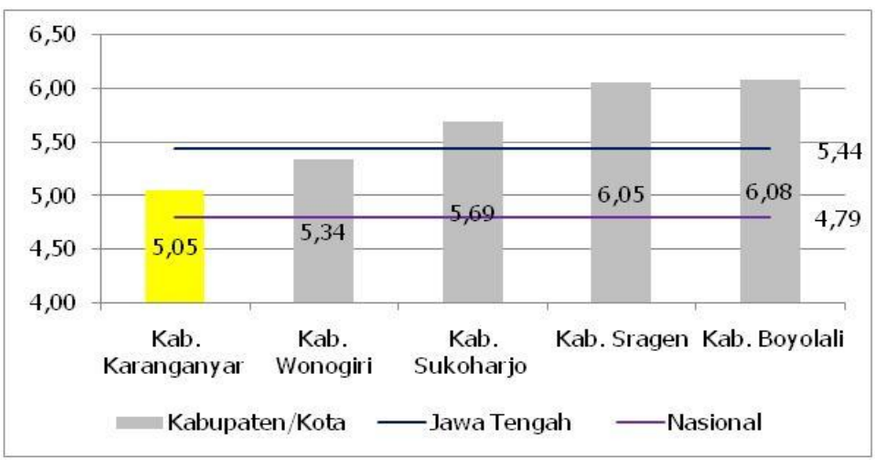

Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten-Kota di Indonesia 2011-2015, 2016

Gambar 2.3. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 (%)

2.2.2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karanganyar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Perkembangan PDRBAtas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukan perkembangan yang positif,yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp.18.757 milyar terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi sebesar Rp.26.883 milyar. Selengapnya dapat dilihat pada gambar 2.4.

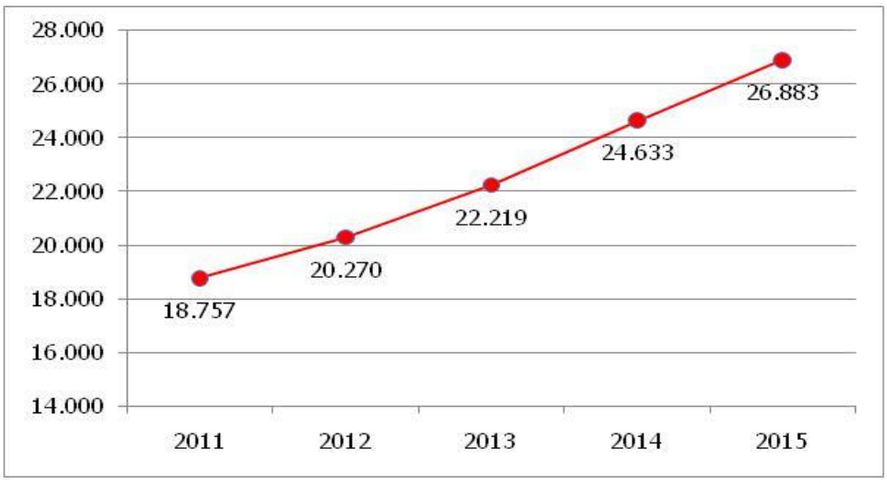

Sumber: Buku Tinjauan PDRB Kab/Kota 2011-2015, Buku 2 Pulau Jawa Bali, 2016

Gambar 2.4. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

Posisi relatif capaian PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar tahun 2015 dengan capaian Rp.26.883,- milliar berada di posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Sragen sebesar Rp. 27.255 milliar. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.5.

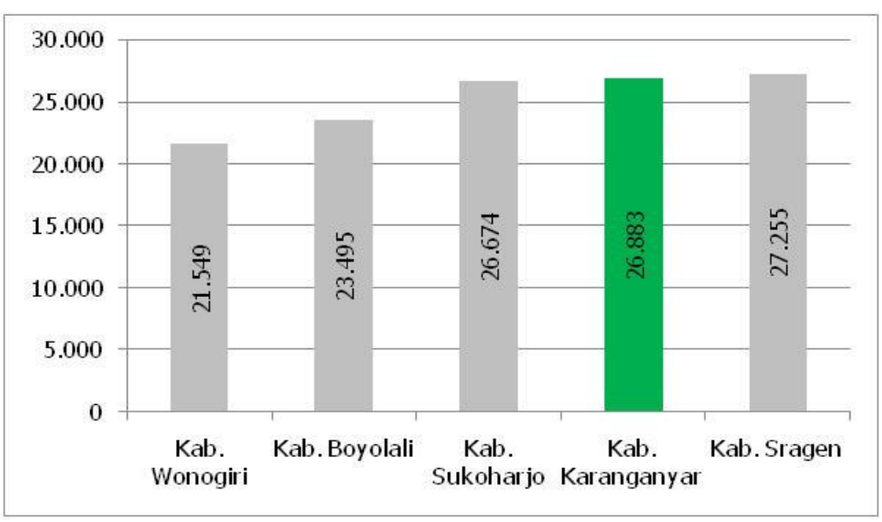

Sumber: Buku Tinjauan PDRB Kab/Kota 2011-2015, Buku 2 Pulau Jawa Bali, 2016

Gambar 2.5. Posisi Relatif PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 (Milliar Rupiah)

Sektor penyumbang terbesar PDRB ADHB di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh tiga sektor, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi tertinggi pada sektor industri pengolahan yang mencapai Rp. 12.169,87 miliar. Selengkapnya PDRB ADHBmenurut lapangan usaha Kabupaten karanganyar tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten KaranganyarTahun 2011-2015 (Milliar Rupiah)

No	**Lapangan** Usaha	**2011**	**2012**	**2013**	**2014*)**	**2015**)**
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	2.801,32	2.945,01	3.295,64	3.559,66	3.985,74
B	Pertambangan dan Penggalian	224,93	233,33	251,67	292,75	338,75
C	Industri Pengolahan	8.495,55	9.197,47	10.011,11	11.241,26	12.169,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29,33	31,94	33,23	34,62	36,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16,20	16,33	17,01	17,82	18,55
F	Konstruksi	1.147,51	1.267,69	1.388,56	1.560,78	1.713,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.289,25	2.384,89	2.589,39	2.743,95	2.985,50
H	Transportasi dan Pergudangan	460,80	496,47	545,05	622,58	670,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	610,43	663,33	703,12	812,26	891,12
J	Informasi dan Komunikasi	225,56	240,16	253,32	271,52	286,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	651,85	715,39	773,87	830,79	916,71
L	Real Estat	324,04	347,58	374,46	424,74	467,98
M,N	Jasa Perusahaan	52,53	57,86	68,89	77,65	88,68
O	Administrasi Peme rintahan, Pertahan an dan Jaminan Sosial Wajib	424,65	473,57	507,63	529,34	566,33
P	Jasa Pendidikan	611,70	782,83	935,67	1.064,11	1.148,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,27	148,99	168,14	196,68	219,39
R,S, T, U	Jasa Lainnya	263,57	266,85	302,49	352,03	378,70
PDRB ADHB		**18.757,48**	**20.269,68**	**22.219,24**	**24.632,03**	**26.883,21**

Sumber: Buku Tinjauan PDRB Kab/Kota 2011-2015, Buku 2 Pulau Jawa Bali, 2016

Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peingkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp.17.205 milliar terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 21.285 milliar, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.6.

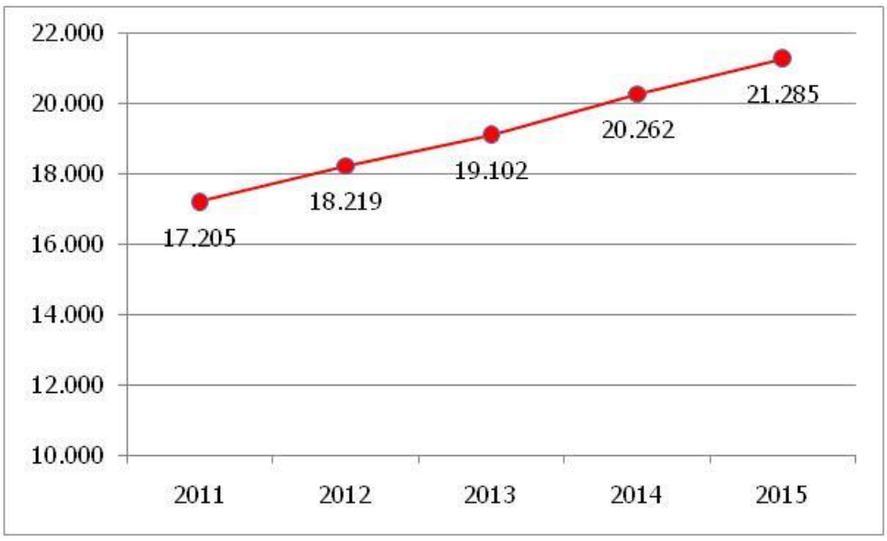

Sumber: Buku Tinjauan PDRB Kab/Kota 2011-2015, Buku 2 Pulau Jawa Bali, 2016

Gambar 2.6. Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 dengan capaian Rp.21.285 milliar menempati posisi ke-3 terendah setelah Kabupaten Wonogiri Rp.16.975 milliar dan Kabupaten Boyolali Rp.18.190 milliar. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.7.

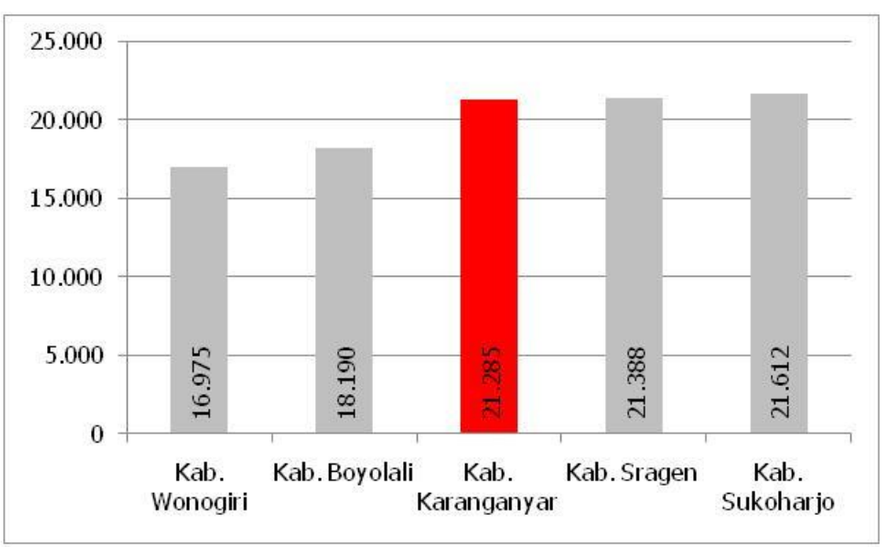

Sumber: Buku Tinjauan PDRB Kab/Kota 2011-2015, Buku 2 Pulau Jawa Bali, 2016

Gambar 2.7. Posisi Relatif PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 (Milliar Rupiah)

Sama halnya dengan kondisi PDRB ADHB, PDRB ADHKmenurut lapangan usaha di Kabupaten Karanganyarjuga didominasi oleh3 sektor, yaitu yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Perkembangan kontribusi per lapangan usaha, PDR ADHK Kabupaten Karanganyartahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. PDRB Atas Dasar Harga Konstan kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015 (Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	2.660,57	2.642,51	2.730,07	2.782,23	2.944,38
B	Pertambangan dan Penggalian	212,52	219,39	231,90	234,79	237,26
C	Industri Pengolahan	7.497,42	8.136,08	8.697,10	9.249,00	9.674,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29,07	31,78	34,56	35,70	35,83
E	Pengadaan Air, Penge lolaan Sampah, Lim bah, dan Daur Ulang	16,09	16,22	16,45	16,81	16,97
F	Konstruksi	1.076,66	1.139,65	1.207,32	1.254,35	1.318,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.132,27	2.222,45	2.320,46	2.403,68	2.537,87
H	Transportasi dan Pergudangan	462,08	494,06	538,42	578,92	605,62
I	Penyediaan Akomoda si dan Makan Minum	588,26	613,49	621,18	662,68	697,28
J	Informasi & Komunikasi	224,03	246,06	267,14	294,10	315,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	599,26	621,06	640,23	661,49	702,93
L	Real Estat	318,43	339,00	362,30	382,27	403,18
M,N	Jasa Perusahaan	50,26	53,29	60,03	65,21	70,91
O	Administrasi Pemerin tahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	418,33	418,81	426,44	427,69	441,20
P	Jasa Pendidikan	544,19	638,20	688,06	757,39	803,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,10	130,41	137,77	153,15	164,53
R,S, T,U	Jasa Lainnya	255,53	256,45	277,10	302,29	314,44
PDRB ADHB		**17.205,06**	**18.219,46**	**19.256,52**	**20.261,77**	**21.284,74**

Sumber: Buku Tinjauan PDRB Kab/Kota 2011-2015, Buku 2 Pulau Jawa Bali, 2016

2.2.3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB per satu orang penduduk, PDRB perkapita menjadi salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun

2015 menunjukkan kinerja yang positif, yaitu terus terjadi peningkatan dari sebesar Rp. 22.777.- ribu pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.31398 ribu pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

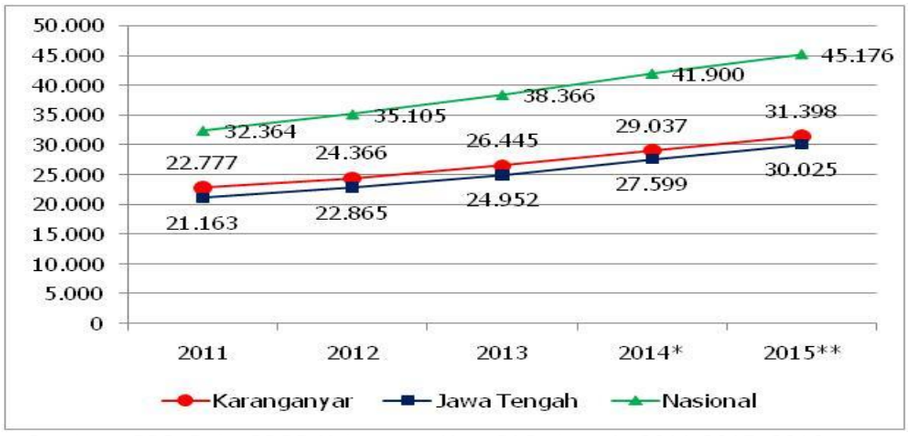

Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten Kota Di Indonesia 2011-2015, 2016

Gambar 2.8. Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Karanganyar,Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah)

Dibandingkan dengan perkembangan PDRB Per kapita ADHB Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, PDRB Per Kapita Kabupaten Karanganyar relevan atau sama-sama terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.8.

Perbandingan PDRB Per kapita Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar Rp.31.398 milliarberada di atasJawa Tengah sebesar Rp.30.025 milliar dan dibawah capaian Nasional sebesar Rp.45.176 milliar. Dibandingkan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah pada Tahun 2015, Kabupaten Karanganyar berada diposisi tertinggi.

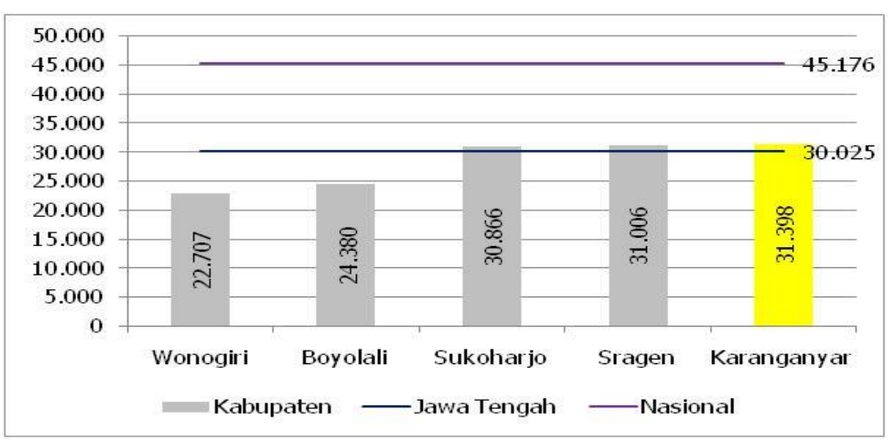

Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten Kota Di Indonesia 2011-2015, 2016

Gambar 2.9. PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 (Ribu Rupiah)

2.2.4. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Inflasi Kabupaten Karanganyarpernah mengalami peningkatan pada tahun 2013 mencapai 8,70% dan tahun 2015 kembali naik menjadi sebesar 5,86%. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun terakhir, inflasi terendah pada tahun 2015 yang mencapai sebesar 2,40%. Pada tahun 2014 hingga tahun 2015, inflasi Kabupaten Karanganyar dan Jawa Tengah mengalami kenaikan, berbeda dengan inflasi Nasional yang mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.10.

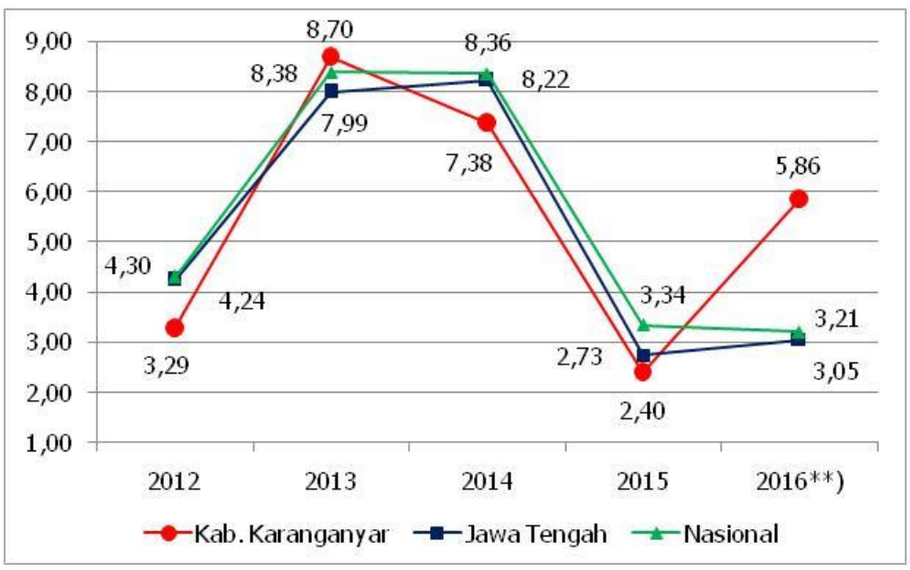

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016
***) Angka sangat sementara*

Gambar 2.10. Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

Inflasi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016 sebesar 5,86%,masih diatas capaian inflasi Jawa Tengah 3,05% dan Nasional 3,21%, sedangkan dibandingkan dengan capaian kabupaten lain disekitarnya berada di posisi tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.11.

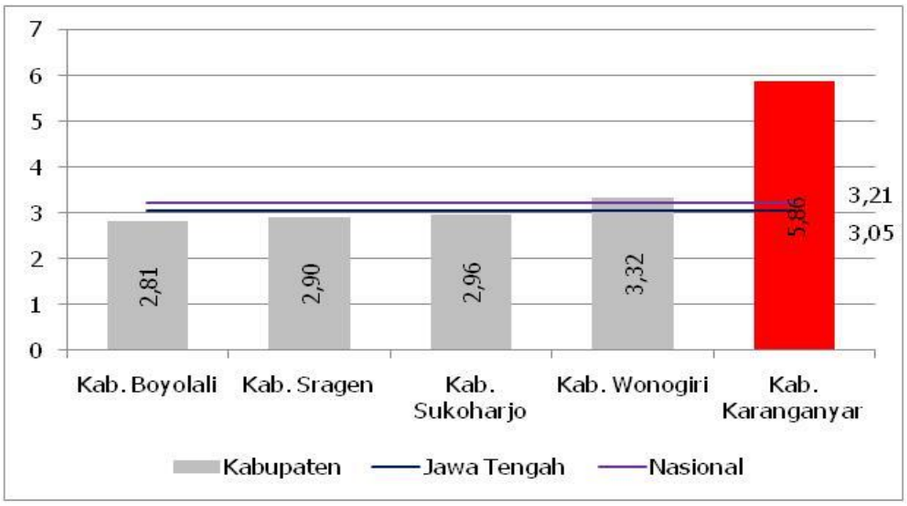

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.11. Posisi Relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 (%)

2.2.5. Indeks Gini

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini.Besarnya nilai Indeks Gini adalah 0 (nol) hingga 1 (satu) yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini ketika bernilai 0 (nol) dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini ketika bernilai 1 (satu). Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu : (1) ketimpangan rendah, (2) ketipangan sedang dan (3) ketimpangan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3. Capaian Indeks Gini dikatakan dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1.

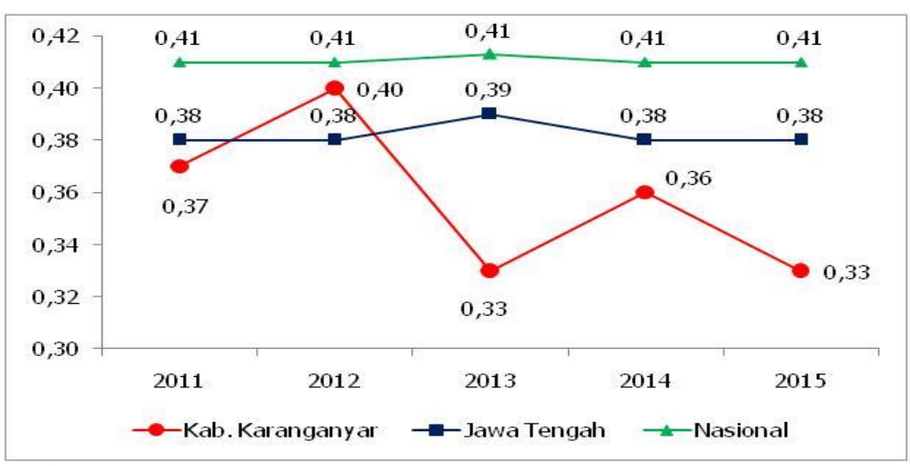

Sumber: BPS , 2016

Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Perkembangan indeks Gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi fluktuasi, yaitu pernah mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadisebesar 0,38 dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,36. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,33. Perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015, tidak sama dengan kondisi capaian Jawa Tengah dan Nasional yang stagnan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.12.

Posisi relatif indeks gini Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 0,33 berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,38 dan Nasional sebesar 0,41. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah, indeks gini Kabupaten Karanganyar berada di posisi ke-2 terendah lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Wonogiri. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.13.

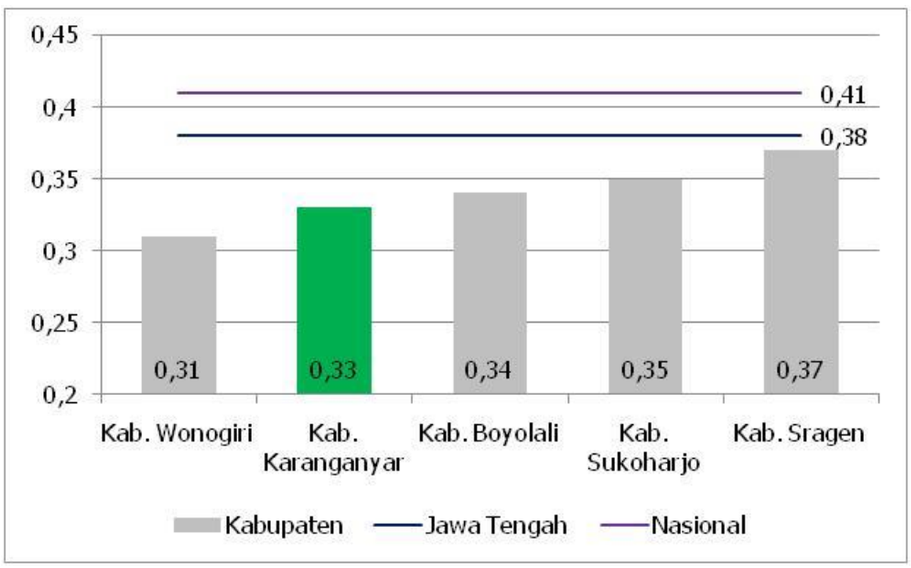

Sumber: BPS , 2016

Gambar 2.13. Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

2.2.6. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi

per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada periode September 2016, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,25% mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan Maret 2016 yang sebesar 73,00%. Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan.

2.2.7. Komoditi Makanan

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan pada September 2016 adalah beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras, untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2016

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Beras	17,87	Beras	21,55
2	Rokok kretek filter	10,72	Rokok kretek filter	8,44
3	Telur ayam ras	7,17	Telur ayam ras	5,99
4	Tempe	2,96	Tempe	3,13
5	Daging ayam ras	2,57	Gula pasir	3,07
6	Gula pasir	2,56	Bawang merah	3,04
7	Mie instan	2,48	Tahu	2,59
8	Tahu	2,31	Mie instan	2,59
9	Bawangmerah	2,10	Daging ayam ras	2,45
10	Roti	2,09	Cabe rawit	2,42

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2016

2.2.8. Komoditi Bukan Makanan

Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah biaya perumahan dan bensin, secara rinci ditunjukkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2016

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Perumahan	7,21	Perumahan	6,50
2	Bensin	3,07	Bensin	2,70
3	Pendidikan	2,91	Listrik	1,82
4	Listrik	2,83	Pendidikan	1,76
5	Perlengkapan mandi	1,63	Kayu bakar	1,29

Sumber: BPS, 2016

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 hingga periode Maret 2015 selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp.236.093,-/kapita/bulan meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.303.056,-/kapita/bulan. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.14.

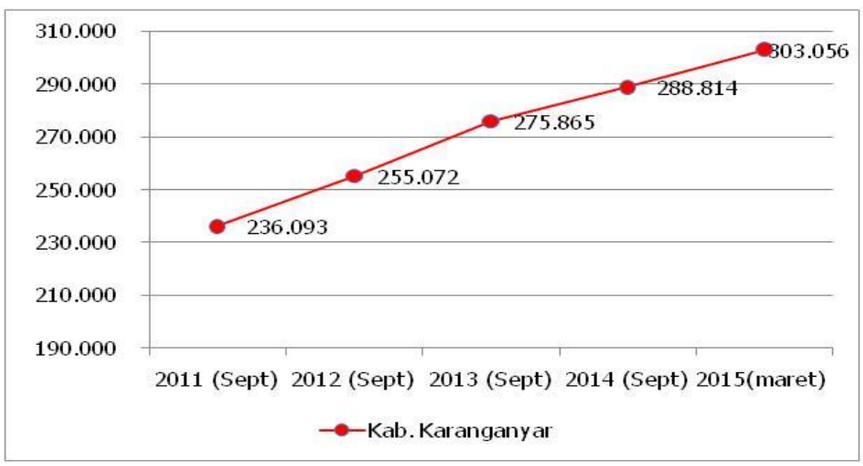

Sumber:BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Jawa Tengah 2015 dan Buku pemerataan pendapatan dan pola konsumsi jawa tengah 2015, 2016

Gambar 2.14. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015 (Rp/Kapita/Bln)

Garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar Rp.303.056,-/kapita/bulan berada di atas Jawa Tengah sebesar Rp.297.851,-/kapita/bulan masih dan dibawah Nasional sebesar Rp.330.776,-/kapita/bulan. Posisi relatif garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berada di posisi ke-17 tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.15.

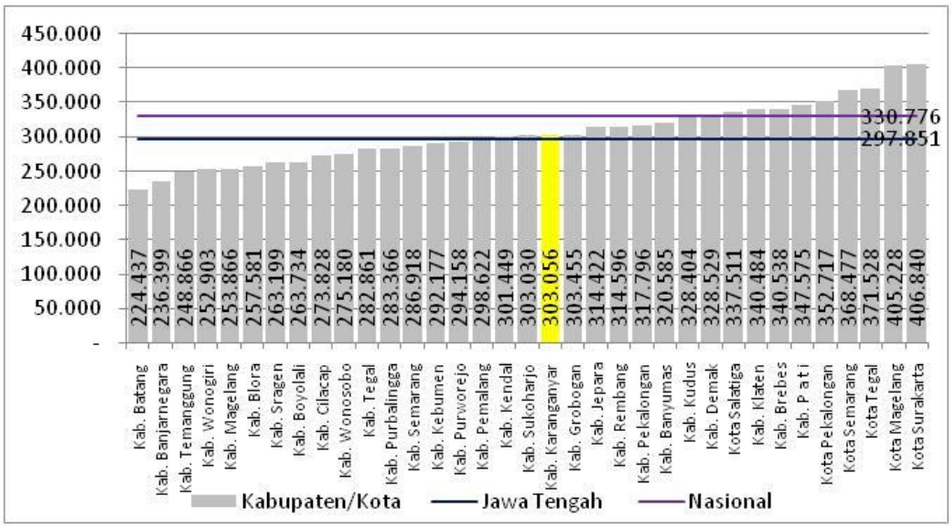

Sumber : BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Jawa Tengah 2015 dan Bukupemerataan pendapatan dan pola konsumsi jawa tengah 2015, 2016

Gambar 2.15. Posisi relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Periode Maret 2015 (Rp/Kapita/Bln)

2.2.9. Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalamipenurunan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 15,29% menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,46%. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, tidak sama dengan perkembanganJawa Tengah yang stagnan dan Nasional yang mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.16.

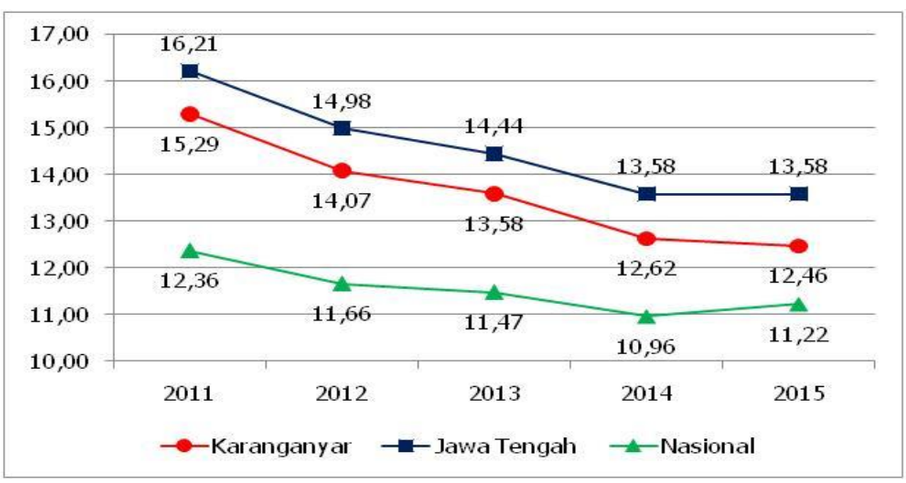

Sumber : BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Provinsi Jawa Tengah 2015,2016

Gambar 2.16. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 12,46% di bawah capaian Jawa Tengah sebesar

11,22% dan di bawah capaian Nasional yang sebesar 13,58%. Dibandingkan kabupaten/kota se Jawa Tengah tahun 2015, Kabupaten Karanganyarpada posisi ke-19 tertinggi, secara rinci dapat ditunjukkan pada Gambar 2.17.

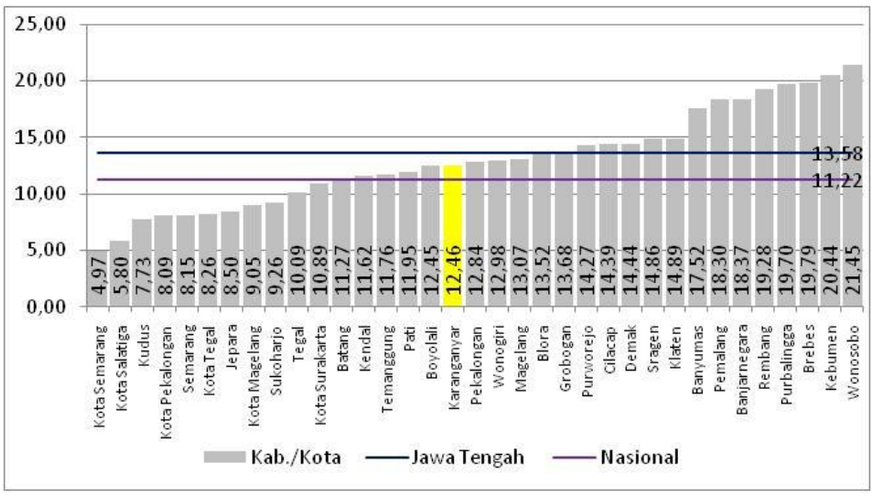

Sumber : BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Provinsi Jawa Tengah 2015,2016

Gambar 2.17. Posisi relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 (%)

2.2.10. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karanganyar pada kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 124.493 jiwa turun menjadi 103.620 jiwa pada tahun 2015. Penurunan jumlah penduduk miskin relevan dengan kondisi persentase penduduk miskin yang juga terus menurun. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Karanganyar tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 2.18.

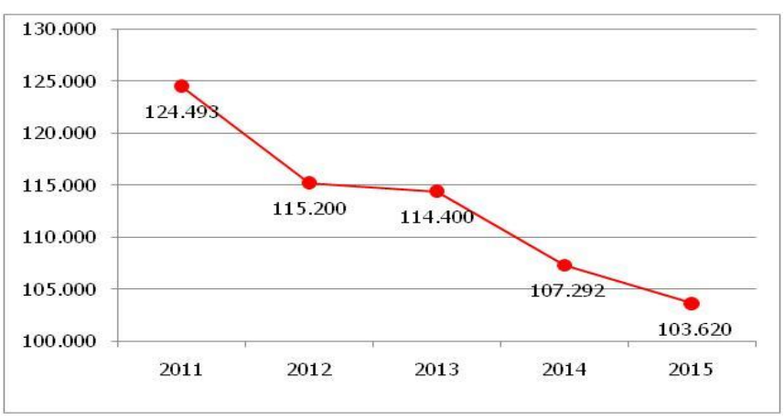

Sumber : BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Provinsi Jawa Tengah 2015,2016

Gambar 2.18. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015 (jiwa)

Sedangkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten karanganyar tahun 2015 sebanyak103.620 jiwa ribu jiwa menempati peringkat ke-2 terendah setelah Kabupaten Sukoharjo sebanyak 80.000 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.19.

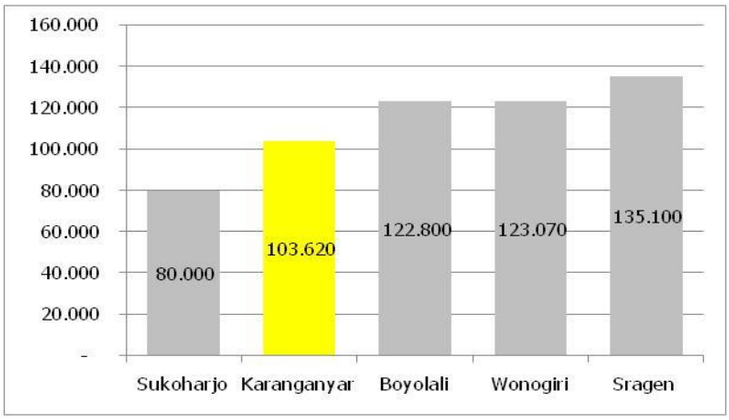

Sumber:BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Provinsi Jawa Tengah 2015, 2016

Gambar 2.19. Posisi relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Periode Maret 2015 (ribu jiwa)

2.2.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 hingga tahun 2015 terjadi fluktuasi,yaitu pada tahun 2011 hingga pada tahun 2013 terus terjadi peningkatan menjadi sebesar 2,36, namun pada tahun 2013 hingga tahun 2015 terus turun menjadi sebesar 1,82. P1 Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan berbeda dengan P1 Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami peningkatan.

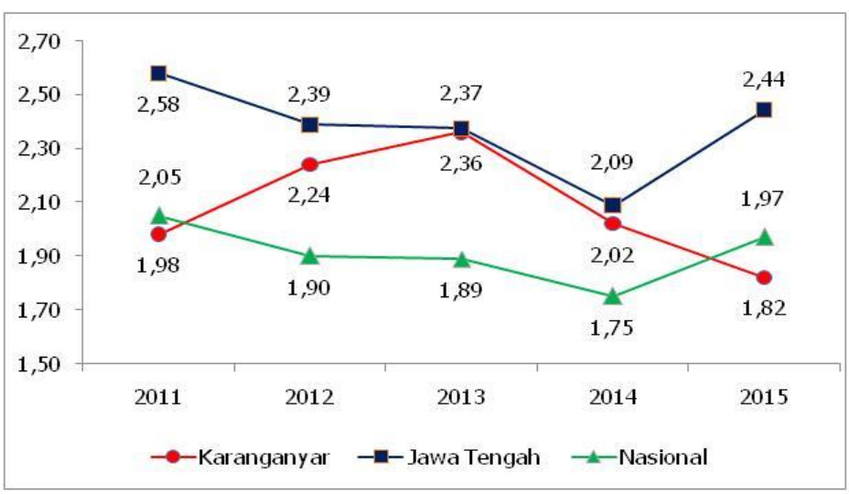

Sumber: BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Provinsi Jawa Tengah 2015, 2016

Gambar 2.20. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar 1,82 dibawah capaian Jawa Tengah (2,44) dan Nasional (1,97), sertamenempati posisi ke-14 terendah dibandingkan 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

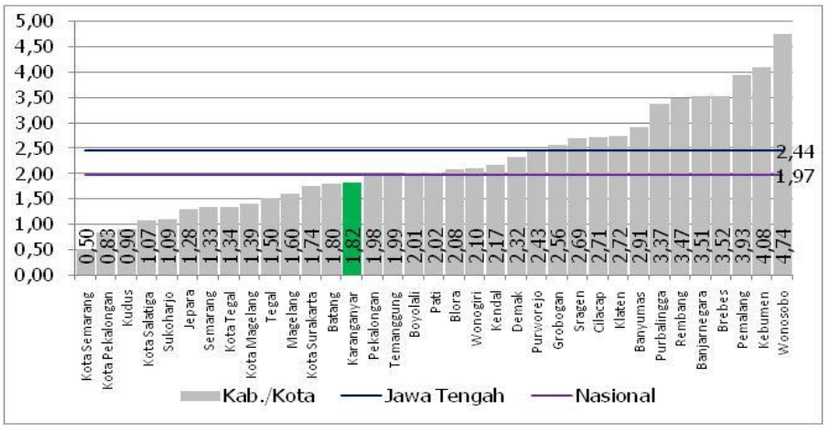

Sumber:BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Provinsi Jawa Tengah 2015, 2016

Gambar 2.21. Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemis kinan (P1) Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

2.2.12. Indeks Keparahan kemiskinan (P2)

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 hingga tahun 2015 terjadi fluktuasi,yaitu pada tahun 2011 hingga pada tahun 2013 terus terjadi peningkatan menjadi sebesar 0,61, namun pada tahun 2013 hingga tahun 2015 terus turun menjadi sebesar 0,40. P2 Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan berbeda dengan P2 Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami peningkatan.

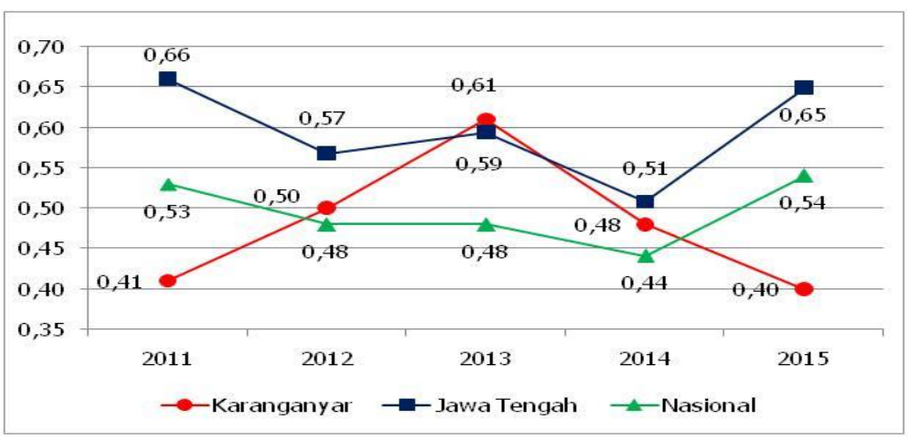

Sumber: BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Provinsi Jawa Tengah 2015, 2016

Gambar 2.22. Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab.Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar 0,40 dibawah capaian Jawa Tengah sebesar 0,65 dan Nasional sebesar 0,54. Posisi relatif Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah berada diposisi ke-12 terendah. Selengkapnya dapat ditunjukkan pada gambar 2.23.

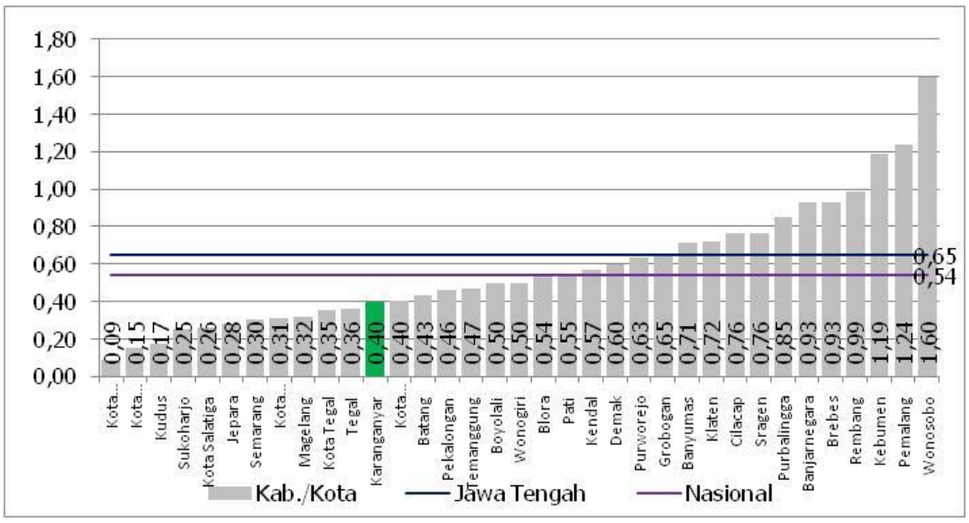

Sumber : BPS, Buku indikator utama sosial politik dan keamanan Provinsi Jawa Tengah 2015,2016

Gambar 2.23. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten KaranganyarTahun 2015 (indeks)

2.2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbukatahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, yaitu pada tahun 2011 sebesar 5,51% naik pada tahun 2012 sebesar 5,82%, dari tahun 2012 hingga tahun 2014 terus menurun menjadi sebesar 3,54%, pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 3,60%. Kondisi tahun 2015 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 turun sebesar 1,99%. Perkembangan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karanganyarpada tahun tahun 2014 ke tahun 2015 dengan kondisi Nasional sama-sama mengalami peningkatan, sedangkan Jawa Tengah mengalami penurunan. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar 2.24.

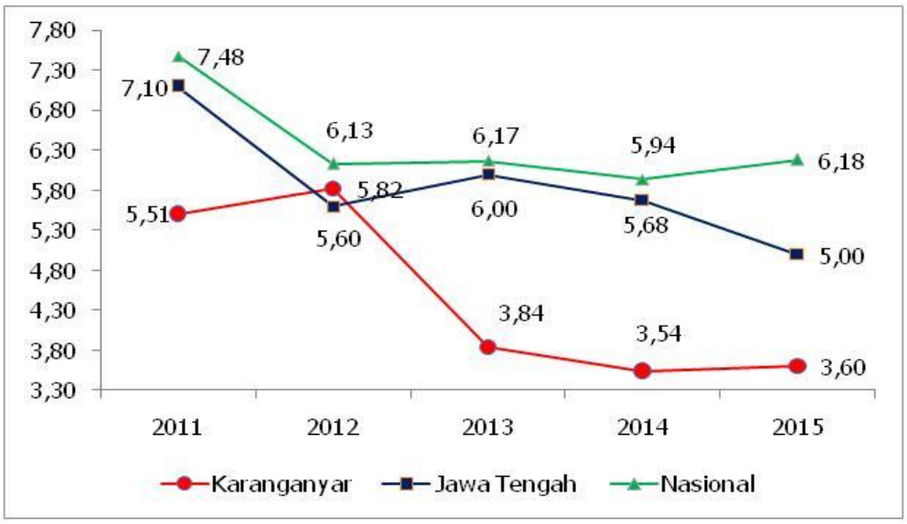

Sumber : BPS, Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas 2015

Gambar 2.24. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)

Dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 3,60%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,99%) dan Nasional (6,18%), serta terendah ketiga diantara Kabupaten sekitarnya setelah Kabupaten Boyolali (2,03%) dan Wonogiri (3,07%),selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.25.

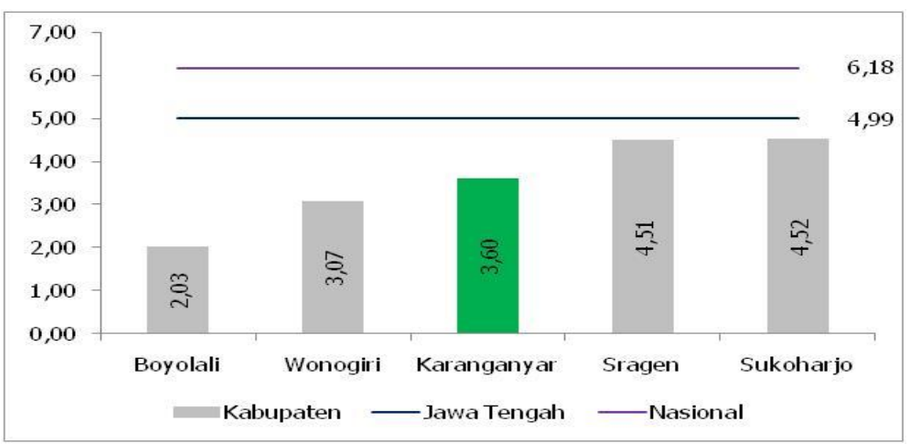

Sumber: BPS, Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas 2015

Gambar 2.25. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 (%)

2.2.14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 hingga tahun 2014 terus menurun, yaitu dari angka 72,71% pada tahun 2011 menjadi 69,58% pada tahun 2014, namun pada Tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 71,18%. Perkembangan TPAK Kabupaten Karanganyar tahun 2014 ke tahun 2015 yang meningkat, berbeda dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah

dan nasional yang mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.26.

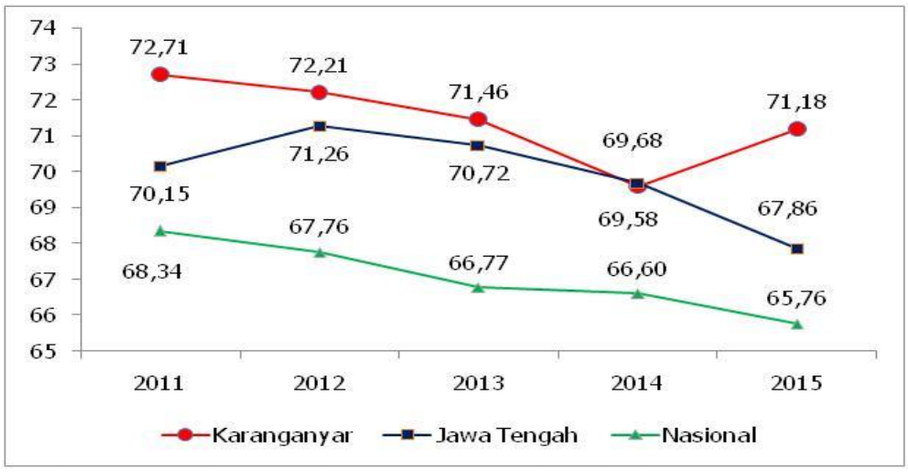

Sumber:BPS, Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas 2015

Gambar 2.26. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)

Dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 71,18% berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (67,86%) dan Nasional (65,76%), serta terendah ketiga setelah Kabupaten Boyolali sebesar 74,68% dan Kabupaten Sragen sebesar 71,91%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.27.

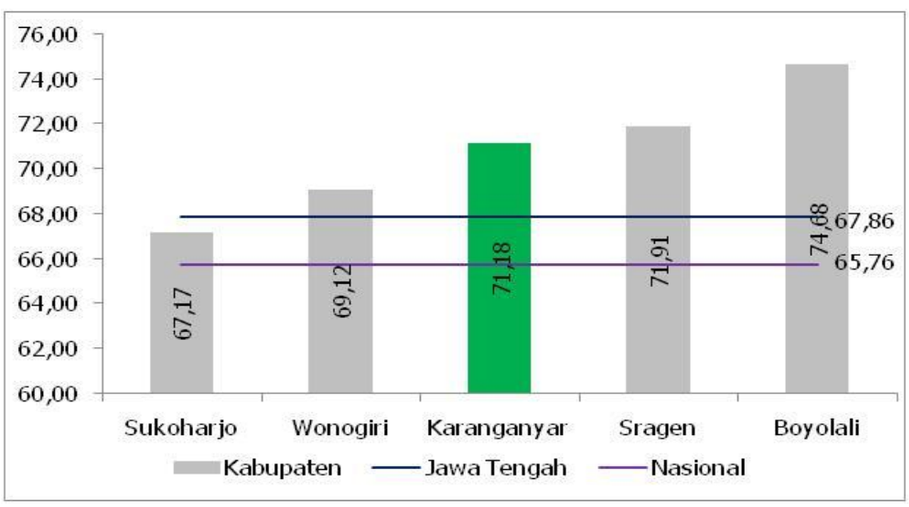

Sumber:BPS, Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas 2015

Gambar 2.27. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten KaranganyarTahun 2015 (%)

2.2.15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu

wilayah/negara. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 IPM Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu pada tahun 2011 sebesar 71,00 meningkat menjadi 74,26 pada tahun 2015. Kondisi tersebut menunjukan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.28.

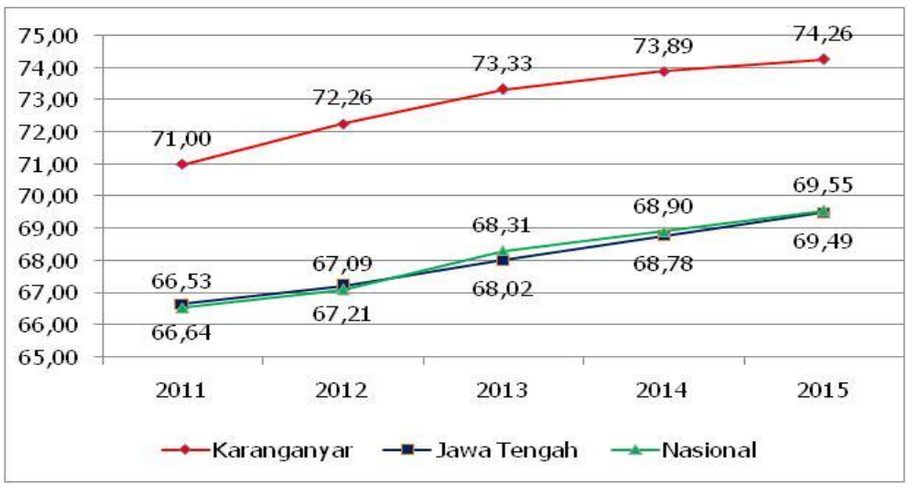

Sumber:Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.28. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

IPM Kabupaten Karanganyarpada tahun 2015 sebesar 74,26 berada diatas capaian Jawa Tengah sebesar 69,49 dan Nasional sebesar 69,55. Dibandingkan dengan IPM kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar menunjukkan posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Sukoharjo sebesar 74,53, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.29.

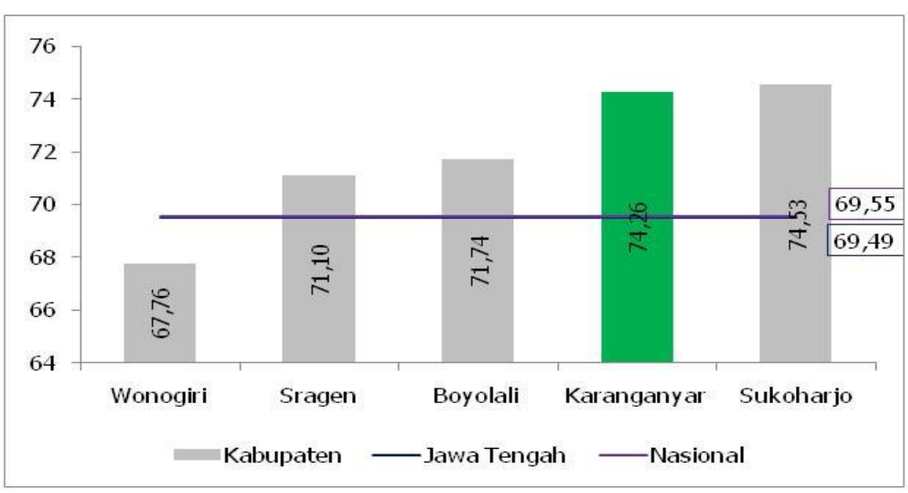

Sumber:Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.29. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten KaranganyarTahun 2015

IPM diukur menggunakan beberapa beberapa indikator pembentuk IPM, yang meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 72,91 tahun dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 74,26 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.30.

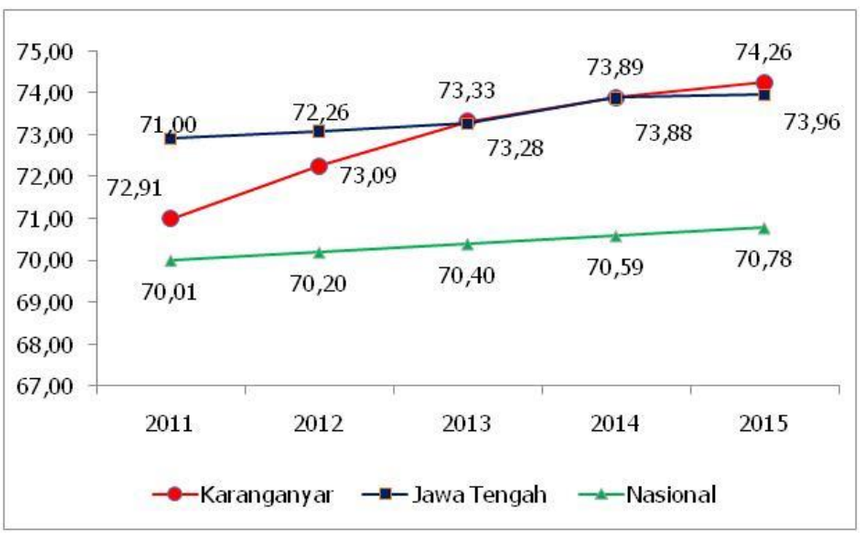

Sumber:Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.30. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (Tahun)

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar 74,53 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,96 tahun dan Nasional sebesar 70,78 tahun, serta menempati posisi kedua tertinggi dibandingkan Kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah setelah Kabupaten Sukoharjo sebesar 74,53 tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.31.

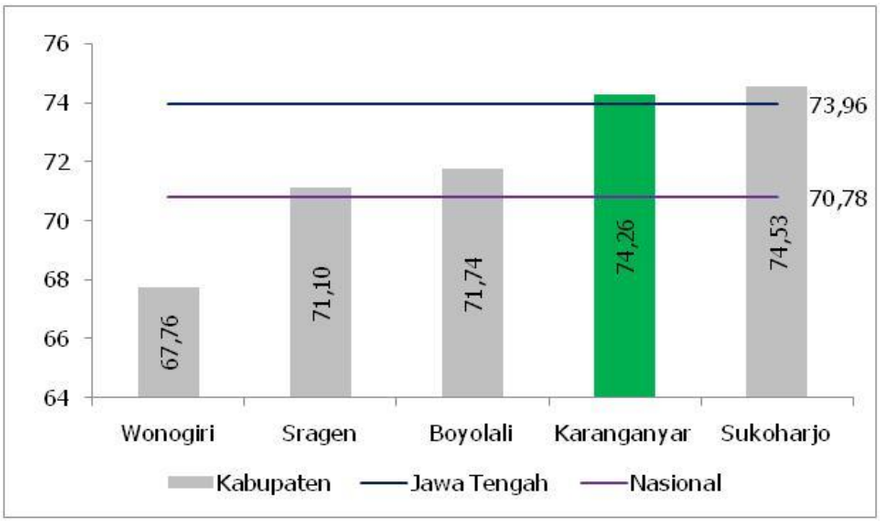

Sumber:Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.31. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 (Tahun)

b. Harapan Lama Sekolah

Untuk Harapan Lama Sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

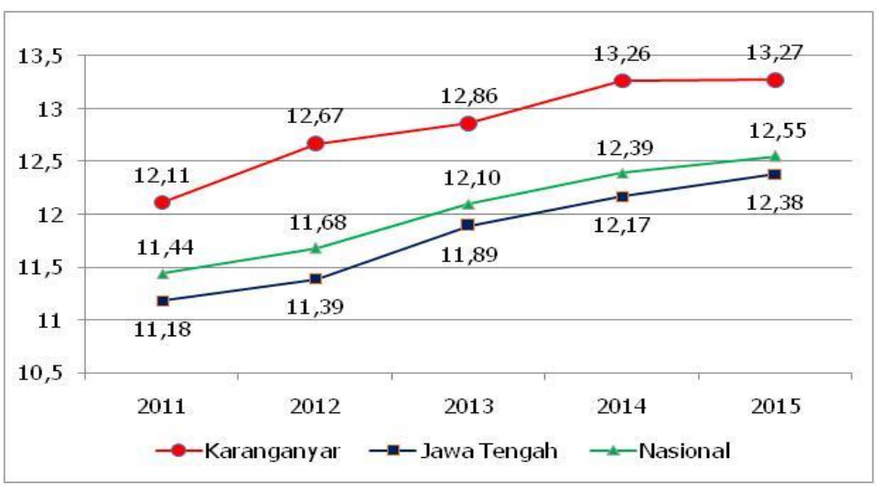

Sumber:Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.32. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan NasionalTahun 2011-2015 (Tahun)

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 12,11 tahun dan

pada tahun 2015 menjadi sebesar 13,27 tahun. Namun kondisi tahun 2014 ke tahun 2015 hanya meningkat sebesar 0,01 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar 13,27 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,38 tahun dan Nasional 12,55 tahun. Dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten sekitar di Jawa Tengah tahun 2015, Kabupaten Karanganyar menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Sukoharjo sebesar 13,42 tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.33.

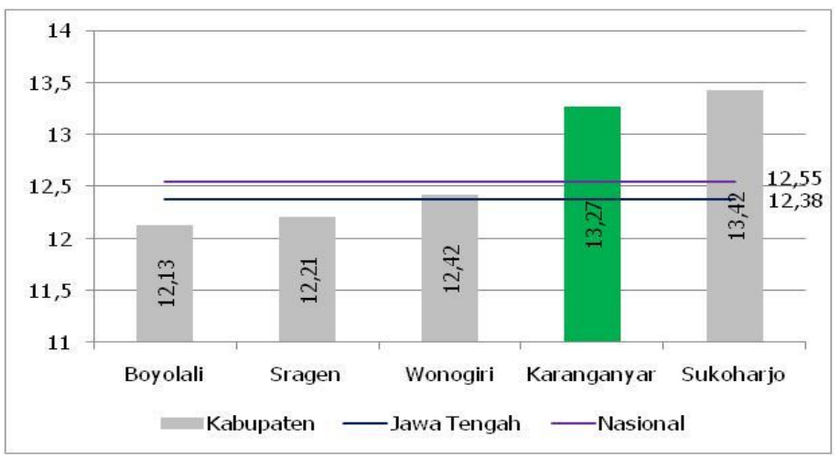

Sumber:Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.33. Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

c. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu siginifikan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 6,24 tahun dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 6,64 tahun. Meskipun demikian perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Jawa Tengah dan Nasional

yang sama-sama mengalami penigkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.34.

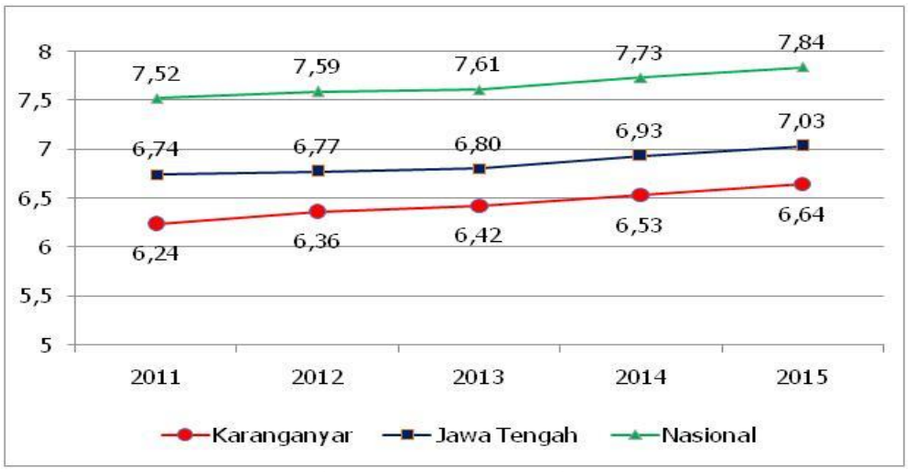

Sumber:Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.34. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 6,64 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,03 tahun dan Nasional sebesar 7,84 tahun. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah pada tahun 2015, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Kabupaten Sragen sebesar 6,71, secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2.35.

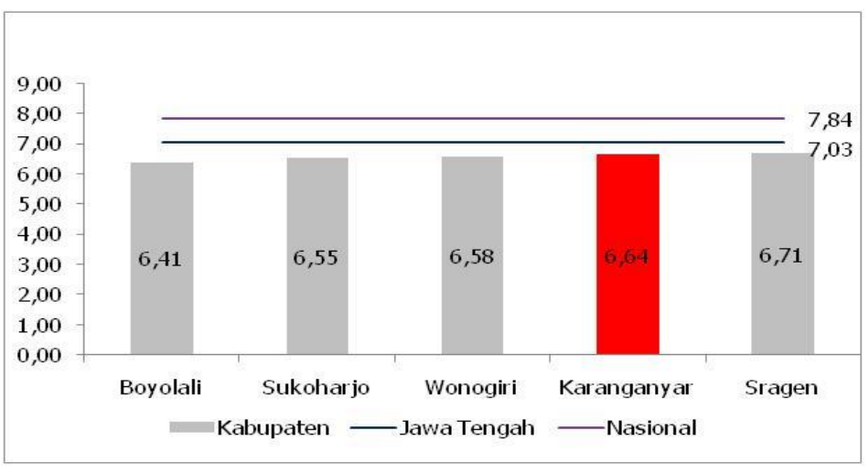

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.35. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 (Tahun)

d. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa semakin meningkatnya daya beli masyarakat sebagai simbol kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Perkembangan

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp.10.023 ribu dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.10.486 ribu. Kondisi pengeluaran per kapita Kabupaten Karanganyar relevan dengan perkembangan pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Tengahsama-sama mengalami peningkatan, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.36.

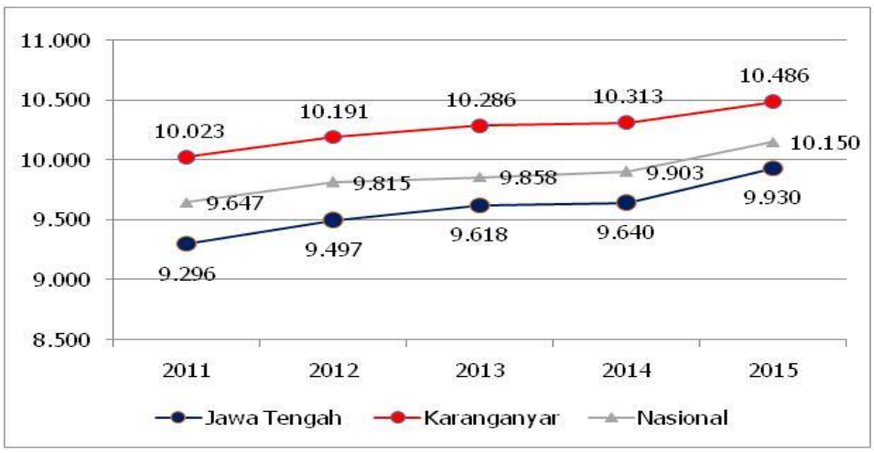

Sumber:Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.36. Perkembangan Perngeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah)

Capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar Rp.10.486 ribu berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.9.930 ribu dan Nasional sebesar Rp.10.150 ribu, serta masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Boyolali sebesar Rp.11.806 ribu dan Kabupaten Sragen sebesar Rp. 11.343 ribu, namun masih lebih tinggi dari 2 (dua) Kabupaten lainnya.

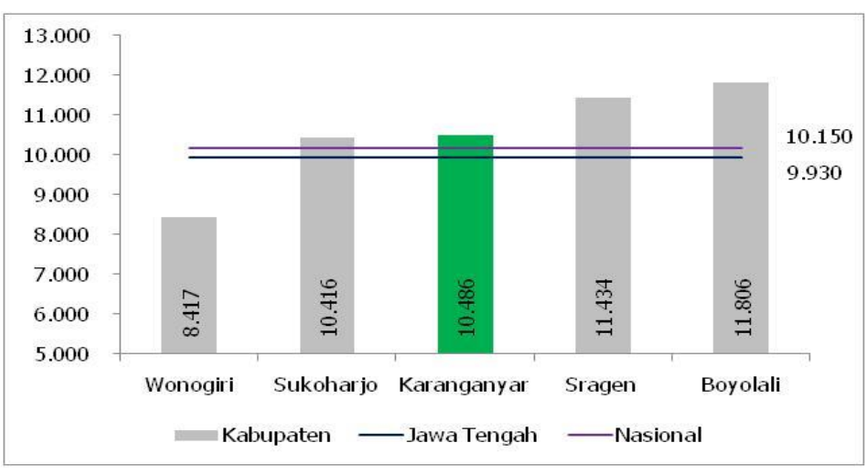

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2016

Gambar 2.37. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 (Ribu Rupiah)

2.2.16. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karanganyar menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2015, yaitu dari sebesar 93,83 pada tahun 2011 menjadi 96,15 pada tahun 2015. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengahdan Nasional tahun 2011 hingga tahun 2015 yang terus mengalami kenaikan.

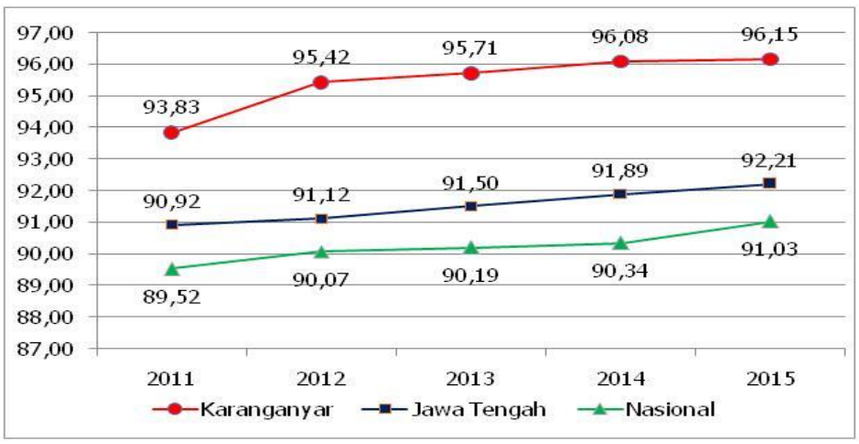

Sumber : KPPA,Buku PMBG, BPS , 2016

Gambar 2.38. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Capaian IPG Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar 96,15 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,21 dan di atas capaian Nasional sebesar 91,03. Jika dibandingkan dengan capaian IPG Kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah tahun 2015, Kabupaten Karanganyar menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Sukoharjo sebesar 96,55. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.39.

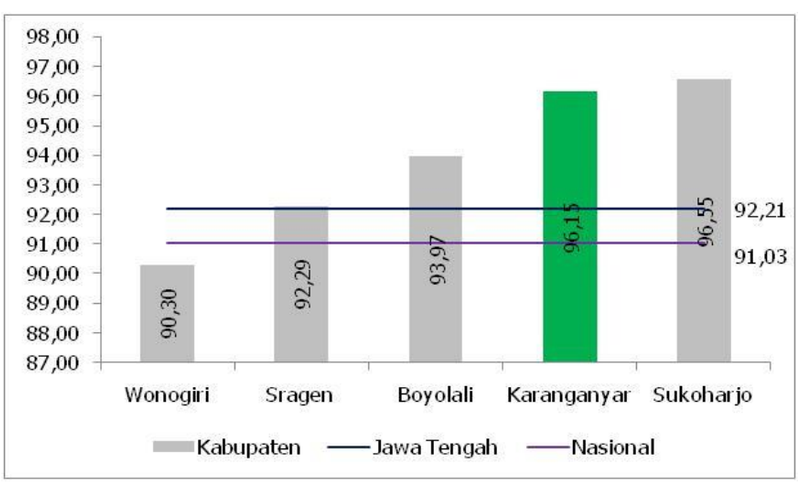

Sumber : KPPA,Buku PMBG, BPS , 2016

Gambar 2.39. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 79,03 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki (75,08 tahun).

Harapan lama sekolah Kabupaten Karanganyar tahun 2015 juga didominasi perempuan sebesar 13,32 tahun dibandingkan laki-laki sebesar 13,26 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah dan Besarnya Sumbangan Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015, laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kabupaten Karanganyar tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11. Perkembangan Indikator Komposit IPG Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015

Tahun	AHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita	
	L	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**
2011	74,61	78,56	12,11	12,33	8,33	6,63	10.543.449	8.667.874
2012	74,64	78,59	12,41	12,72	8,54	7,10	10.662.444	9.351.502
2013	74,67	78,62	12,72	12,91	9,18	7,63	10.782.782	9.828.205
2014	74,68	78,63	13,25	13,31	9,26	7,70	10.895.907	10.307.667
2015	75,08	79,03	13,26	13,32	9,28	7,72	10.922.000	10.369.000

Sumber : KPPA,Buku PMBG, BPS , 2016

Perkembangan IDG pada tahun 2011 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 66,44 dan pada tahun 2014menjadi sebesar 77,00. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 75,84. Berbeda dengan perkembangan capaian IDG Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional pada tahun 2011 hingga tahun 2015 yang terus meningkat.

Capaian IDG Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar 75,84 berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,80 dan Nasional sebesar 70,83. Secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2.40.

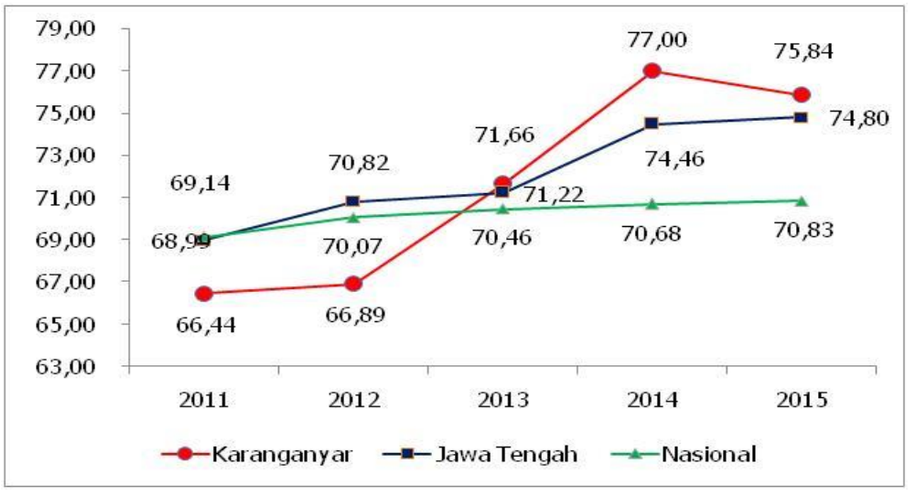

Sumber : KPPA,Buku PMBG, BPS , 2016

Gambar 2.40. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Dibandingkan dengan capaian IDG Kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah tahun 2015, Kabupaten Karanganyar menempati posisi tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.41.

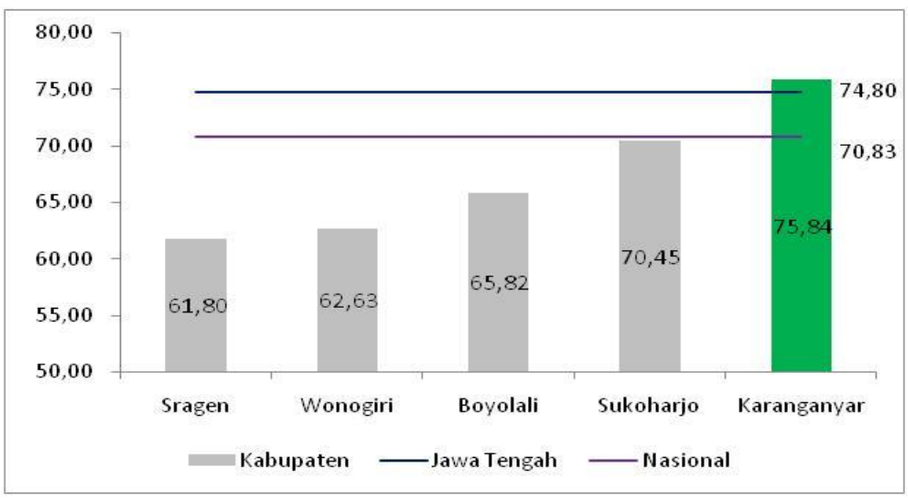

Sumber : KPPA,Buku PMBG, BPS , 2016

Gambar 2.41. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

Komponen pembentuk Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Karanganyar tahun 2011-2015, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2011 hingga tahun 2014cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2011 sebesar 13,33% dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 24,44%, namun pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 22,22%.

Kondisi Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Karanganyartahun 2011 hingga

tahun 2014 terus meningkat, namun pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 47,03%.Berbeda dengan kondisi indikator komposit IDG lainnya, sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Karanganyar terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu dari 35,68% pada tahun 2011 menjadi 38,10% pada tahun 2015. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kabupaten Karanganyar dapat kita lihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12. Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	13,33	17,78	17,78	24,44	22,22
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	46,27	48,18	51,67	56,72	47,03
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	35,68	36,09	36,91	37,76	38,10

Sumber : KPPA,Buku PMBG, BPS , 2016

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dalam pelaksanaan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dalam pelaksanaan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, sebagaimana Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Evaluasi Kinerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALI SASI	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh						
1	Meningkatnya sarana prasarana perhubungan/ transportasi	1.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	58,90%	61,35%	104,16%
		2.	Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik	83,40%	79,13%	94,88%
2	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pertanian dalam arti luas	1.	Persentase kondisi jaringan irigasi baik	62,65%	75,47%	120,46%
3	Kecukupan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah	1.	Proporsi pemba ngunan sarana pra sarana pelayanan publik dan perkan	95,00%	85.50%*)	90.00%*)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALI SASI	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			toran pemerintah			
4	Penataan dan pengendalian tata ruang daerah	1.	Persentase alih guna lahan	500 bidang (0,13%)	313 bidang	137,40%
5	Pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi perumahan layak huni	1.	Persentase cakupan layanan air bersih perkotaan	88,60%	94,00%	106,09%
		2	Persentase cakupan layanan air bersih pedesaan	83,40%	84,00%	100,72%
		3.	Persentase cakupan layanan sanitasi	63,30%	80,00%	126,38%
Misi 2 : Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri						
1	Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan industri, perdagangan, koperasi dan jasa	1	Prosentase pertambahan usaha mikro	40,00%	50,00%	125,00%
2	Meningkatnya investasi di daerah	1	Nilai Investasi (milyar rupiah)	7800	14.561	186,68%
Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis						
1	Menigkatnya kesem patan mengenyam pendidikan 12 tahun bagi penduduk Kab. Karanganyar, terutama kelompok miskin	1	Angka Putus Sekolah			
			SD/MI/SDLB	0,02	0,02	100,00%
			SMP/MTs/SMPLB	0,12	0,11	108,33%
			SMA/MA/SMK	0,03	0,04	66,67%
		2	Angka melek huruf	99,89	99,90	100,01%
2	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)			
			SD/MI/SDLB	6,05	6,01	99,34%
			SMP/MTS/SMPLB	3	3,01	100,33%
			SMA/MA/SMK	3	3,01	100,33%
3	Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat	1	IPM	80,64	74.26*)	92.09*)
		2	AHH	72,35	77.11*)	106.58*)
4	Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan	1	Rasio dokter per satuan penduduk (per jiwa)	1/3315	1/2867	115,63%
		2	Rasio bidan per satuan penduduk (per jiwa)	1/2600	1/1223	212,59%
5	Ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana kesehatan secara optimal	1	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1/42392	1/41644	101,80%
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat meningkatkan pola hidup sehat dan lingkungan sehat (kesehatan preventif)	1.	Angka prevalensi gizi buruk	0,85	0,040	195,29%
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan						
1.	Meningkatnya keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam	1.	Persentase kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan di	36,00%	36,00%	100,00%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALI SASI	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	pembangunan desa		tingkat desa/kelurahan			
2.	Pertumbuhan nilai produksi	1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	24,61%	14.83*)	60.26%*)
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya						
1	Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras dan agama	1	Jumlah Konflik	1	1	100,00%
2	Adat dan budaya daerah dilestarikan	1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	463	279	60,26%
3	Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik	1	Opini BPK	WTP	WTP*)	100%*)
		2	Ketersediaan regulasi daerah yang mengatur keterbukaan informasi publik	1 Perbup dan 1 SK	1 Perbup dan 1 SK	100,00%

Ket *) : Data sementara dari Badan Pusat Statistik Karanganyar

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi di Tahun 2017 yang bersifat fisik adalah :

1) belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing wilayah/daerah,
2) jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk mendukung dan menunjang peningkatan produktivitas pertanian;
3) sarana prasarana transportasi belum dapat optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
4) belum optimalnya infrastruktur pelayanan sosial seperti prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, ekonomi , seni budaya dan ruang publik ;
5) masih terdapatnya kawasan kumuh, belum terpenuhinya ketersediaan sarana air bersih /air minum, serta ketersediaan akses sanitasi yang layak, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta pemerataan antar wilayah kecamatan;
6) keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanannya.

Sedangkan yang bersifat non fisik adalah :

1) masih banyak jumlah penduduk miskin
2) menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi, penurunan jumlah pekerja dari sektor pertanian, serta masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja
3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya
4) rendahnya kualitas SDM UMKM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Serta masih kurang kondusifnya iklim usaha, ketersediaan data UMKM secara riil.

Memperhatikan permasalahan tersebut diatas dan arah kebijakan pembangunan, berapa upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah :

a) Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan (sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor) yang mempunyai kotribusi besar terhadap PDRB. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
b) Mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
c) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan indeks pembangunan manusia.
d) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*), karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama

terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

e) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Karanganyar, di samping menciptakan lapangan kerja.

f) Mengembangkan program-program usaha mandiri yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan *(seed capital)* melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok *(a group lending approach)* dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal.

g) Memfasilitasi pengembangan kelompok usaha bersama dan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola secara bersama dan gotong royong.

h) Membangun promosi bersama *(joint marketing)* dalam memasarkan potensi lokal melalui kerjasama semua pihak.